



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/MK/PK/2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
22/KM.7/2024 TENTANG PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI
HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG TELAH DITENTUKAN
PENGUNAANNYA UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KM.7/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu melakukan penyesuaian atas Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan

Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/KM.7/2024 TENTANG PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KM.7/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;

3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
5. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Dalam Negeri;
6. Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Direktur Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
10. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan;
11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
12. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan;
13. Para Gubernur se-Indonesia;
14. Para Bupati/Walikota se-Indonesia;
15. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2026

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/MK/PK/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 22/KM.7/2024 TENTANG PENANDAAN RINCIAN
BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH
YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA UNTUK
EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- A. PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR
- I. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1	1.03.10.1.01.0052	Rehabilitasi Jembatan
2	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan
3	1.03.10.1.01.0047	Pemeliharaan Berkala Jembatan
4	1.03.10.1.01.0049	Pelebaran Jembatan
5	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan
6	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan
7	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan
8	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan
9	1.03.10.1.01.0050	Pembangunan Terowongan/ <i>Tunnel</i>
10	1.03.10.1.01.0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
11	1.03.10.1.01.0046	Penggantian Jembatan
12	1.03.10.1.01.0048	Pembangunan Underpass
13	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
14	1.03.10.1.01.0055	Pembangunan Flyover
15	1.03.10.1.01.0051	Pelebaran Jalan Menuju Standar
16	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan
17	2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
18	2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
19	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
20	2.15.02.1.05.0006	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
21	2.15.02.1.07.0007	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
22	2.15.02.1.07.0011	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
23	2.15.02.1.07.0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan
24	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
25	2.15.02.6.04.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)
26	2.15.02.6.04.0008	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
27	2.15.05.4.09.0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretapain Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi
28	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
29	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
30	2.15.03.1.09.0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional
31	2.15.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
32	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
33	2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
34	2.15.04.3.01.0006	Pengelolaan Bandara
35	2.15.04.3.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara
36	2.15.04.3.02.0002	Pembangunan Bandar Udara

II. OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan
2	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan
3	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan
4	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan
5	1.03.10.2.01.0066	Pembangunan Flyover
6	1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar
7	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan
8	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan
9	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan
10	1.03.10.2.01.0050	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
11	1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan
12	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan
13	1.03.10.2.01.0054	Pembangunan Terowongan/ <i>Tunnel</i>
14	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan
15	1.03.10.2.01.0070	Pembangunan Underpass
16	1.03.10.2.01.0049	Pelebaran Jembatan
17	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
18	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
19	2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
20	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
21	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
22	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
23	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
24	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
25	2.15.02.2.06.0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
26	2.15.02.2.06.0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan
27	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
28	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
29	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
30	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
31	2.15.03.2.12.0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
32	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
33	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
34	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
35	2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
36	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
37	2.15.03.2.15.0003	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
38	2.15.05.3.06.0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota
39	2.15.05.4.06.0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota

B. PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman
2	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
3	1.04.05.1.01.0007	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman
4	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
5	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
6	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
7	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
8	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
9	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
10	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
11	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

C. PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I. PAJAK ROKOK PROVINSI

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1	1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
2	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis <i>Telemedicine</i> , dll)
5	1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ <i>Regional Maintenance Center</i>
6	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
7	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
8	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
9	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
10	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
11	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
12	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan <i>Telemedicine</i> di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
13	1.02.02.1.01.0024	Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ <i>Regional Maintenance Center</i>
14	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
15	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit
16	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
17	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
18	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
19	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
20	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
21	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
22	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
23	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
24	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
25	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
26	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
27	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
28	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
29	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
30	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
31	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
32	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
33	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
34	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
35	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
36	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
37	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
38	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
39	1.02.02.1.02.0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik
40	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
41	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
42	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
43	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
44	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
45	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
46	1.02.02.3.01.0041	Mendukung Pembangunan Puskesmas
47	1.02.02.3.01.0042	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan <i>telemedicine</i> , dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialisik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
48	1.02.02.3.02.0031	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)
49	1.02.02.3.02.0032	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
50	1.02.02.3.02.0033	Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan di wilayah Provinsi
51	1.02.02.3.02.0034	Dukungan pelayanan kesehatan lainnya
52	1.02.02.3.02.0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS
53	1.02.02.3.02.0036	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS
54	1.02.02.3.02.0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB
55	1.02.02.3.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria
56	1.02.02.3.02.0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak
57	1.02.02.3.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta
58	1.02.02.3.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis
59	1.02.02.3.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan
60	1.02.02.3.02.0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia
61	1.02.02.3.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
62	1.02.02.3.02.0045	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua
63	1.02.02.3.02.0046	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan
64	1.02.02.3.02.0047	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS
65	1.02.02.3.02.0048	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit IMS
66	1.02.02.3.02.0049	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit TB
67	1.02.02.3.02.0050	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Malaria
68	1.02.02.3.02.0051	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta
69	1.02.02.3.02.0052	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis
70	1.02.02.3.02.0053	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacingan
71	1.02.02.3.02.0054	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia
72	1.02.02.3.02.0055	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
73	1.02.02.3.02.0056	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
74	1.02.02.3.02.0057	Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
75	1.02.02.4.01.0041	Mendukung Pembangunan Puskesmas
76	1.02.02.4.02.0031	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)
77	1.02.02.4.02.0032	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
78	1.02.02.4.02.0033	Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi
79	1.02.02.4.02.0034	Dukungan pelayanan kesehatan lainnya
80	1.02.02.4.02.0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS
81	1.02.02.4.02.0036	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS
82	1.02.02.4.02.0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB
83	1.02.02.4.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria
84	1.02.02.4.02.0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak
85	1.02.02.4.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta
86	1.02.02.4.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan
87	1.02.02.4.02.0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia
88	1.02.02.4.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
89	1.02.02.4.02.0045	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua
90	1.02.02.4.02.0046	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan
91	1.02.02.4.02.0047	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS
92	1.02.02.4.02.0048	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit IMS
93	1.02.02.4.02.0049	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit TB
94	1.02.02.4.02.0050	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Malaria
95	1.02.02.4.02.0051	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta
96	1.02.02.4.02.0052	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis
97	1.02.02.4.02.0053	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacingan
98	1.02.02.4.02.0054	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia
99	1.02.02.4.02.0055	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
100	1.02.02.4.02.0056	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
101	1.02.02.4.02.0057	Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
102	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
103	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
104	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
105	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
106	1.02.03.3.02.0003	Pengembangan Rumah Sakit Untuk Wahana Pendidikan
107	1.02.03.3.02.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan
108	1.02.03.3.02.0005	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua
109	1.02.03.3.02.0006	Penyediaan Beasiswa Ikatan Dinas
110	1.02.03.3.02.0007	Penyediaan dan Pembiayaan Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah
111	1.02.03.3.02.0008	Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal
112	1.02.03.3.02.0009	Penyediaan pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan
113	1.02.03.3.02.0010	Pembentukan balai pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan
114	1.02.03.3.02.0011	Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
115	1.02.03.3.03.0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN
116	1.02.03.3.04.0001	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil
117	1.02.03.3.05.0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
118	1.02.03.3.06.0001	Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat
119	1.02.03.3.07.0002	Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat
120	1.02.03.3.08.0001	Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari OAP
121	1.02.03.4.02.0003	Pengembangan Rumah Sakit Untuk Wahana Pendidikan
122	1.02.03.4.02.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
123	1.02.03.4.02.0005	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua
124	1.02.03.4.02.0006	Penyediaan Beasiswa Ikatan Dinas
125	1.02.03.4.02.0007	Penyediaan dan Pembiayaan Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah
126	1.02.03.4.02.0008	Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal
127	1.02.03.4.02.0009	Penyediaan pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan
128	1.02.03.4.02.0010	Pembentukan balai pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan
129	1.02.03.4.02.0011	Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
130	1.02.03.4.03.0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasidengan Program JKN
131	1.02.03.4.04.0001	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil
132	1.02.03.4.05.0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
133	1.02.03.4.06.0001	Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat
134	1.02.03.4.07.0002	Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat
135	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
136	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
137	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
138	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
139	1.02.05.1.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
140	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
141	1.02.05.3.01.0002	Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan
142	1.02.05.4.01.0002	Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan
143	1.02.07.3.01.0001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
144	1.02.07.3.01.0002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)
145	1.02.07.3.01.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)
146	1.02.07.4.01.0002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)
147	1.02.07.4.01.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)
148	1.05.02.1.01.0023	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi
149	1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
150	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

II. BAGI HASIL PAJAK ROKOK KABUPATEN/KOTA

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
2	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas
3	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
5	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas
6	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
7	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
8	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
9	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
10	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
11	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
12	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
13	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
14	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit
15	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
16	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis <i>Telemedicine</i>)
17	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
18	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
19	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
20	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
21	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
22	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
23	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
24	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
25	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
26	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
27	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
28	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
29	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
30	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
31	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
32	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
33	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
34	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
35	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
36	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
37	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
38	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
39	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
40	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
41	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
42	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
43	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
44	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
45	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
46	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan <i>Telemedicine</i> di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
47	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
48	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
49	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
50	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
51	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
52	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
53	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
54	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
55	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
56	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
57	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
58	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
59	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
60	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
61	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
62	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
63	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
64	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
65	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
66	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
67	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
68	1.02.02.3.02.0047	Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya
69	1.02.02.3.02.0058	Pelayanan Kesehatan orang dengan Penyakit penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota
70	1.02.02.3.02.0059	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan
71	1.02.02.3.02.0060	Penyusunan tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan.
72	1.02.02.3.02.0061	Verifikasi dan penerbitan perizinan berusaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan
73	1.02.02.3.02.0062	Penanggulangan penyakit IMS
74	1.02.02.3.02.0063	Penanggulangan penyakit Malaria
75	1.02.02.3.02.0064	Penanggulangan penyakit Kusta
76	1.02.02.3.02.0065	Penanggulangan penyakit Filariasis
77	1.02.02.3.02.0066	Penanggulangan penyakit Kecacingan
78	1.02.02.3.02.0067	Penanggulangan penyakit Frambusia
79	1.02.02.3.02.0068	Penanggulan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
80	1.02.02.3.02.0069	Penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota
81	1.02.02.3.02.0070	Pengelolaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan
82	1.02.02.4.02.0047	Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya
83	1.02.02.4.02.0059	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan
84	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
85	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
86	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
87	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
88	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
89	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
90	1.02.03.3.05.0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
91	1.02.03.4.05.0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
92	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
93	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
94	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
95	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
96	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
97	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
98	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
99	1.02.05.2.01.0002	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman
100	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
101	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
102	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
103	1.02.07.3.02.0001	Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
104	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
105	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
106	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
107	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

D. PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
1	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R
2	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
3	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
4	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
5	1.03.05.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
6	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
7	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
8	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
9	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
10	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
11	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
12	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
13	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
14	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
15	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
16	1.03.05.2.01.0030	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
17	1.03.05.2.01.0031	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
18	1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
19	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
20	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
21	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat
22	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
23	2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
24	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
25	2.11.03.2.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
26	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
27	2.11.03.2.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
28	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
29	2.11.03.2.03.0006	Pelaksanaan remediasi
30	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi
31	2.11.03.2.03.0010	Pelaksanaan Restorasi
32	2.11.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
33	2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya
34	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
35	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
36	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
37	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
38	2.11.05.2.01.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
39	2.11.05.2.01.0004.	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
40	2.11.05.2.02.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
41	2.11.05.2.02.0005	Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
42	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
43	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah

No.	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan
44	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan
45	2.11.11.2.01.0024	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
46	2.11.11.2.01.0025	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelaaan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus
47	2.11.11.2.01.0026	Operasionalisasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus
48	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
49	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
50	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
51	2.11.11.2.01.0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
52	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

